



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHANDRA OKANTARA
2. Jabatan : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
3. NHK : 140086

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 894.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 289.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/76 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 464.250.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.750.000
3. MOTOR, HONDA CRF 250 RALLY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.4 G/AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.855.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.533.604

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.464.638.604

III. HUTANG Rp. 224.588.169

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.240.050.435



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.